

MINILATERALISME SEBAGAI MODEL DAN STRATEGI KERJASAMA BARU NEGARA-NEGARA KAWASAN INDO-PASIFIK DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Agus Haryanto

Pusjianmar Seskoal

agusxlv@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i12.162>

Abstrak

Indo-Pasifik saat ini menjadi sebuah kawasan yang menjadi pusat perhatian di bidang geoekonomi dan geopolitik tidak hanya bagi negara-negara yang ada di sekitarnya namun juga di lingkungan global. Perhatian tersebut tak lepas dari perkembangan dan kemajuan China di dalam mengimplementasikan strategi raya mereka untuk menjadi pemain kunci di tingkat global dan tak segan menggunakan pendekatan diplomasi, politik, maupun kekuatan militer guna mempengaruhi negara lain agar mendukung kebijakan dan kepentingan nasional mereka termasuk penyelesaian berbagai sengketa yang melibatkan wilayah maritim terutama di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Berbagai kebijakan, strategi dan upaya dilakukan oleh negara-negara berkepentingan untuk membendung hegemoni China tersebut menggunakan cara-cara diplomasi seperti kerjasama, dialog, aliansi baik yang bersifat tradisional seperti kerjasama bilateral maupun multilateral. Kerjasama minilateral yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil negara yang berfokus efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian menjadi sebuah alternatif baru di Kawasan Indo-Pasifik. Kajian ini mencoba untuk menelaah bagaimana kerjasama tersebut dapat terjalin, faktor-faktor apa saja yang melandasinya serta bagaimana Indonesia sebaiknya bersikap di dalam menghadapi perkembangan situasi tersebut.

Kata kunci: model kerjasama minilateralisme, Kawasan Indo-Pasifik, ASEAN, Kerjasama Indonesia, Strategi Kawasan

PENDAHULUAN

Pengertian “Indo-Pasifik” secara umum mengacu pada kombinasi perairan antara Samudera Hindia dan Pasifik (*Indian Ocean and Pacific Ocean*) dan suatu hal yang lumrah ketika menginterpretasikan istilah Indo-Pasifik sebagai wilayah yang tidak

hanya terdiri dari dua samudra melainkan juga meliputi negara-negara yang ada di sekelilingnya. Terlepas dari setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda terhadap terhadap konteks geografis wilayah tersebut sebagian besar setuju bahwa kawasan Indo-pasifik saat ini memiliki nilai

sangat strategis di bidang ekonomi, politik, militer dan lainnya.¹ Dalam aspek geoekonomi, kawasan ini menjadi domain bagi tiga negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yaitu China, India, dan Jepang. Selain itu di dalamnya juga terdapat tujuh dari kekuatan militer terbesar di dunia.²

Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi pusat perhatian dalam geopolitik global, tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga karena kompleksitas keamanan dan kestabilan politiknya. Tantangan strategis di bidang geopolitik yang ada tersebut terus bertumbuh secara luas diakibatkan oleh perbatasan geografis yang saling tumpang tindih. Di tengah dinamika ini, minilateralisme muncul sebagai strategi kolaboratif yang menjanjikan antara negara-negara kecil hingga menengah untuk menghadapi tantangan bersama. Professor Ian Hall dari Griffith University mengatakan bahwa di Indo-Pasifik telah terjadi perubahan model kerjasama minilateral untuk mengatasi isu-isu yang menjadi perhatian bersama, menggantikan model tradisional bilateral dan multilateral.³

¹ WADA, H. (2020). The "Indo-Pacific" Concept: Geographical Adjustment and Their Implications. In RSIS Working Paper Series.

² Jochheim, U., & Barbosa Lobo, R. (2023). Geopolitics in the Indo-Pacific: Major players' strategic perspectives. In EPRS | European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751398/EPRS_BRI\(2023\)751398_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751398/EPRS_BRI(2023)751398_EN.pdf)

³ Singh, B., & Teo, S. (2020). *Minilateralism in The Indo-Pacific, The Quadrilateral Security Dialogue, Lancang-Mekong Cooperation Mechanism, and ASEAN* (1st ed.). Routledge 2.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di kawasan yang posisinya berada di pusat wilayah regional Indo-Pasifik tentu sangat terpengaruh dan memiliki kepentingan besar terhadap situasi yang terjadi tersebut. Melalui naskah ini, penulis berusaha untuk menelaah bagaimana dinamika situasi tersebut bisa terjadi di kawasan, sehingga pembaca mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang model minilateralisme sebagai sebuah strategi baru di samping kerjasama bilateral dan multilateral dalam dinamika geopolitik.

METODE PENELITIAN.

Penelitian dan kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh dan merujuk pada sumber-sumber informasi dari berbagai referensi baik di media cetak maupun di di dunia maya. Artikel ini mengeksplorasi mengapa model kerja sama baru tersebut bisa muncul, apa keuntungan dan kerugiannya dalam ranah/domain maritim serta bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap menghadapi dinamika tersebut.

PEMBAHASAN

1. Strategi Minilateralisme.

a. Asal Muasal.

Minilateralisme sesungguhnya bukanlah sebuah konsep baru. Pada era Eropa di

awal abad ke-19 hingga saat ini, minilateralisme telah ada selama bertahun-tahun. Popularitasnya semakin meningkat ketika negara-negara besar di dunia sedang bergulat dengan konflik-konflik besar seperti Perang Rusia Ukraina, juga persaingan yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dan China. Karakteristik menonjol dari minilateralisme adalah penekanan pada kepentingan bersama dan bukan lagi nilai-nilai bersama atau keselarasan ideologi. Karena itu negara-negara yang tergabung di dalamnya dapat berkolaborasi terhadap isu-isu penting dengan tidak harus menyepakati segala hal atau memiliki pandangan global yang sama.⁴ Kemitraan berbasis aliansi yang dipimpin AS, terutama kemitraan bilateral masih menjadi sebuah elemen kerjasama yang penting dalam arsitektur strategis di Indo-Pasifik, namun karakteristik baru diperlukan di mana mitra-mitra Amerika Serikat seperti Australia dan Jepang terpaksa harus menghadapi potensi ancaman keamanan yang lebih berat.

Di sisi lain China telah berhasil menguatkan hubungan ekonomi dengan mitra strategis mereka di kawasan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah melahirkan model kerjasama keamanan baru dalam bentuk minilateralisme. Upaya dan grand strategi

China untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui berbagai diplomasi agresif dan kekuatan telah memaksa negara-negara yang berbenturan merasa perlu untuk merumuskan strategi berbeda dalam meresponnya.⁵

Konsep minilateralisme yang merupakan alternatif lanjutan dari kerjasama bilateral dan multilateral yang telah ada sebelumnya saat ini menjadi trend bagi negara-negara tersebut karena menganggap pola-pola lama tidak lagi mampu menjawab tantangan yang ada. Kerjasama kecil (bilateral) maupun terlalu luas (multilateral) yang telah berlangsung lama mulai diragukan efektivitasnya untuk mampu mengatasi berbagai persoalan yang membutuhkan respon segera serta sulitnya tercapai kesepakatan bersama terhadap suatu permasalahan dan isu-isu tertentu. Minilateralisme merujuk pada kerjasama antara sejumlah kecil negara dalam suatu kawasan atau topik tertentu, di luar struktur multilateral yang lebih besar seperti PBB atau WTO. Di Kawasan Indo-Pasifik, minilateralisme sering melibatkan negara-negara seperti Jepang, Australia, India, dan negara-negara ASEAN dalam bentuk dialog, kerjasama keamanan, atau pembangunan infrastruktur.

⁴ <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/minilateralism-concept-changing-world-order>, diakses tanggal 7 Juli 2024

⁵ <https://www.orfonline.org/research/explaining-the-rise-of-minilaterals-in-the-indo-pacific>, diakses tanggal 7 Juli 2024

b. Keuntungan dan tantangan. Salah satu keuntungan utama minilateralisme adalah fleksibilitasnya yang lebih besar dibandingkan dengan forum multilateral yang cenderung lamban dalam pengambilan keputusan. Negara-negara dalam minilateralisme dapat dengan cepat menanggapi tantangan regional seperti perubahan iklim, keamanan maritim, atau kesehatan masyarakat tanpa terjebak dalam proses birokrasi yang panjang. Meskipun menjanjikan, minilateralisme juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah koordinasi yang rumit antara negara-negara yang memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Selain itu, minilateralisme bisa dilihat oleh negara-negara besar sebagai ancaman terhadap supremasi atau pengaruh mereka di kawasan tersebut. Dengan demikian, minilateralisme di Kawasan Indo-Pasifik adalah instrumen yang penting dalam merespons tantangan kompleks dalam bidang keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, minilateralisme menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi masalah-masalah regional yang membutuhkan kerjasama lintas negara. Dengan demikian, langkah-langkah untuk memperkuat minilateralisme diharapkan akan terus didorong untuk mendorong stabilitas dan kemakmuran di kawasan yang semakin strategis ini.

2. Contoh-contoh kerjasama dengan model minilateralisme di kawasan.

Di kawasan Indo-Pasifik, ada beberapa contoh kerjasama minilateralisme yang menonjol:

- a. *Quad (Quadrilateral Security Dialogue)*. Quad adalah kemitraan strategis informal antara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia yang berfokus pada keamanan maritim, stabilitas regional, serta kerjasama dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan bantuan kemanusiaan.
- b. *AUKUS*. AUKUS adalah kemitraan keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. AUKUS terutama berfokus pada transfer teknologi militer, termasuk kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia, dan pengembangan kapabilitas pertahanan di Indo-Pasifik.
- c. *Trilateral Strategic Dialogue (TSD)*. TSD merupakan dialog keamanan trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Fokus TSD adalah pada keamanan maritim, pertahanan misil, dan koordinasi kebijakan regional.
- d. *Malabar Naval Exercise*. Kerjasama ini berupa militer tahunan yang melibatkan Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia yang berlangsung sejak 2020. Latihan ini bertujuan meningkatkan interoperabilitas Angkatan Laut dan kesiapan militer keempat negara dalam

menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik.

e. *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan ketiga negara tersebut.

f. *Trilateral Cooperation Secretariat (TCS)*. Adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari China, Jepang, dan Korea Selatan yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama trilateral di berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan keamanan.

g. *Indian Ocean Rim Association (IORA)* Organisasi regional ini terdiri dari negara-negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia, termasuk Australia, India, Indonesia, dan Afrika Selatan. IORA berfokus pada kerja sama ekonomi, keamanan maritim, manajemen bencana, dan pariwisata.

h. *BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)*. BIMSTEC adalah organisasi internasional yang melibatkan negara-negara di sekitar Teluk Benggala, yaitu Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal, dan Bhutan. BIMSTEC berfokus pada kerja sama ekonomi, transportasi, energi, dan perubahan iklim.

i. *Trilateral Infrastructure Partnership*. Kerjasama antara Amerika Serikat, Jepang,

dan Australia ini bertujuan untuk meningkatkan investasi infrastruktur di Indo-Pasifik. Kemitraan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas di kawasan ini.

j. *ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia)*. ReCAAP adalah perjanjian regional yang melibatkan 20 negara Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN. ReCAAP bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim dan mengatasi masalah perompakan dan perampokan bersenjata di laut.

k. *Cobra Gold*. Kerjasama berbentuk latihan militer multinasional tahunan yang diselenggarakan oleh Thailand dan Amerika Serikat, dengan partisipasi dari beberapa negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan militer dan kerjasama di antara negara-negara peserta.

l. *Lancang-Mekong Cooperation (LCM)*. Minilateralisme Lancang-Mekong mengacu pada kerangka kerja sama di antara negara-negara yang berada di sepanjang Sungai Lancang-Mekong, dengan fokus pada pembangunan regional, integrasi ekonomi, dan pengelolaan sumber daya air. Bentuk minilateralisme ini melibatkan lebih sedikit negara dibandingkan dengan organisasi

multilateral yang lebih besar, dengan tujuan untuk mencapai kerja sama yang lebih fokus dan efisien. Kerangka utama yang memfasilitasi kerja sama ini adalah Kerjasama Lancang-Mekong (LMC), yang mencakup China dan lima negara Asia Tenggara yang dilalui Sungai Mekong: Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

m. ASEAN Plus. Di dalam ASEAN sendiri, minilateralisme sering terjadi dalam bentuk dialog-track atau kerjasama kecil antara beberapa negara anggota. ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea Selatan) dan ASEAN Regional Forum (ARF) adalah contoh struktur minilateralisme yang berfungsi untuk mengatasi isu-isu keamanan dan ekonomi di kawasan.

n. ASEAN *Defence Ministers' Meeting (ADMM)-Plus*. ADMM-Plus melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN serta delapan mitra dialog (Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat). Forum ini berfokus pada kerjasama pertahanan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Contoh-contoh kerjasama dengan model minilateralisme di atas menunjukkan bagaimana negara-negara di Indo-Pasifik berkolaborasi dalam berbagai bidang untuk mengatasi tantangan bersama dan memanfaatkan peluang ekonomi serta keamanan yang ada.

3. Indonesia menghadapi Minilateralisme.

Minilateralisme di kawasan Indo-Pasifik dapat membawa sejumlah dampak negatif bagi kepentingan Indonesia. Berikut adalah beberapa potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan:

a. Keterpinggiran dalam pengambilan keputusan. Minilateralisme cenderung melibatkan sejumlah kecil negara, sehingga memunculkan eksklusivitas dan Indonesia mungkin terpinggirkan dari pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kawasan. Selain itu juga potensi kehilangan pengaruh dalam menentukan kebijakan regional ada kemungkinan akan terjadi karena tidak dilibatkannya Indonesia dalam kerjasama minilateral tertentu.

b. Ketegangan geopolitik. Kerjasama keamanan minilateral seperti AUKUS dapat meningkatkan ketegangan dengan negara-negara besar seperti China, yang bisa berdampak negatif pada stabilitas regional dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut.

c. Dilema Keamanan. Indonesia mungkin akan terjebak dalam dilema keamanan, di mana harus memilih pihak atau mempertahankan netralitas di tengah persaingan kekuatan besar.

d. Ketergantungan ekonomi. Terlalu bergantung pada kerjasama ekonomi dengan negara-negara tertentu dalam kerangka minilateral dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara tersebut, mengurangi diversifikasi ekonomi dan daya tahan terhadap guncangan eksternal. Selain itu minilateralisme dapat memperkuat blok-blok perdagangan yang eksklusif, yang mungkin merugikan Indonesia jika tidak termasuk dalam blok tersebut.

e. Perbedaan kesetaraan dalam kerjasama. Negara-negara yang lebih kuat dalam kerjasama minilateral mungkin memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan negara-negara yang lebih kecil atau kurang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama minilateral mungkin tidak selalu sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, sehingga bisa terjadi ketimpangan dalam pembangunan regional.

f. Ancaman terhadap kedaulatan negara. Kerjasama minilateral yang terlalu erat dalam bidang keamanan dan pertahanan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruh asing terhadap kedaulatan dan independensi kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu partisipasi dalam latihan militer multilateral bisa meningkatkan risiko intervensi militer asing di wilayah Indonesia.

g. Selain dampak di atas, tentu masih banyak hal lain yang dapat dikaji dan perlu diantisipasi misalnya terkait dengan dampak lingkungan, peningkatan kompetisi regional, fragmentasi regional seperti pembentukan blok-blok baru dan diskriminasi kebijakan.

PENUTUP.

Minilateralisme adalah model kerjasama antara sejumlah kecil negara dalam suatu kawasan atau topik tertentu, di luar struktur multilateral yang lebih besar. Kerjasama ini terjadi akibat perkembangan lingkungan strategis kawasan yang menuntut negara-negara mempersiapkan diri menghadapi isu-isu dan ancaman yang sewaktu-waktu membahayakan kepentingan masing-masing. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia guna menghadapi perkembangan lingkungan strategis regional untuk mengatasi dampak negatif minilateralisme adalah dengan memperkuat diplomasi dengan terus berperan aktif dalam kerjasama regional, mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara guna mengurangi ketergantungan kepada salah satu blok tertentu, memperkuat kapasitas nasional di berbagai bidang baik ekonomi, militer, diplomatik serta terus menerus mendorong transparansi dan inklusivitas dalam kerjasama guna kepentingan bersama di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Grünwald, R. (2021). Lancang-Mekong Cooperation: Overcoming the Trust Deficit on the Mekong. *Yusof Ishak Institute*, 2335–6677.
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/06/ISEAS_Perspective_2021_89.pdf
- Jochheim, U., & Barbosa Lobo, R. (2023). Geopolitics in the Indo-Pacific: Major players' strategic perspectives. In *EPRS | European Parliamentary Research Service*.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751398/EPRS_BRI\(2023\)751398_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751398/EPRS_BRI(2023)751398_EN.pdf)
- Minilateralism: A Concept That Is Changing the World Order*. (n.d.). The Washington Institute.
<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/minilateralism-concept-changing-world-order>
- Rajagopalan, R. P. (2020). Explaining the Rise of Minilaterals in the Indo-Pacific. <https://www.orfonline.org/>. Retrieved July 7, 2024, from <https://www.orfonline.org/research/explaining-the-rise-of-minilaterals-in-the-indo-pacific>
- Singh, B., & Teo, S. (2020). *Minilateralism in The Indo-Pacific, The Quadrilateral Security Dialogue, Lancang-Mekong Cooperation Mechanism, and ASEAN* (1st ed.). Routledge 2.
- Southeast Asian Security between India and China. (2023). In *Contemporary Southeast Asia* (Vols. 45–45, Issue 2, pp. 145–165).
- The Changing Balance of Military Power in the Indo-Pacific Region. (2020). In *Paper Prepared for the 2020 Conference on Taiwan in the Indo-Pacific Region*.
- WADA, H. (2020). The “Indo-Pacific” Concept: Geographical Adjustment and Their Implications. In the *RSIS Working Paper Series*.
- Administration, B. (2023). The “Quad”: Cooperation Among the United States, Japan, India, and Australia. In <https://crsreports.congress.gov>
<https://crsreports.congress.gov>